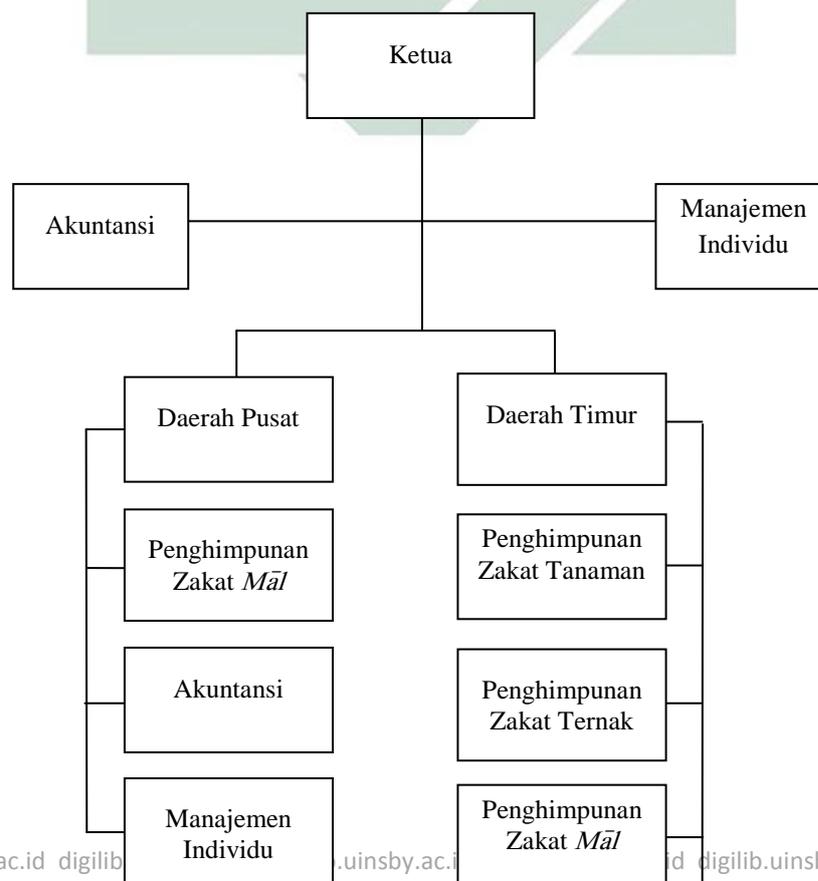


Bagan Struktur Organisasi Amil Zakat Atas Dasar Fungsi Bagian

Bentuk struktur yang lain ialah bentuk organisasi yang didasarkan atas kawasan, Bentuk ini terdiri dari beberapa unsur: yaitu Ketua, Manajemen Individu, Akuntansi, dan pengurus kawasan-kawasan beserta seksinya masing-masing, seperti pada bagan berikut:

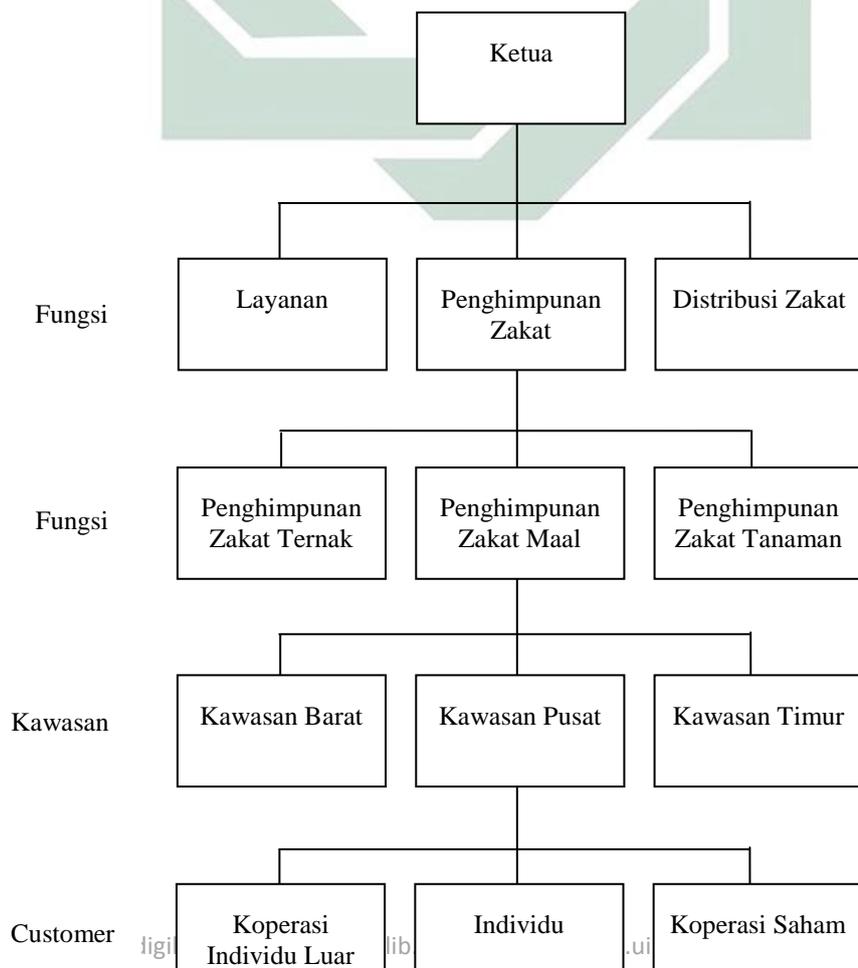
Gambar 2.3



Bagan Struktur Organisasi Berdasar Kawasan

Bentuk struktur organisasi yang lainnya adalah paduan antara dasar fungsi dengan kawasan.

Gambar 2.4



regulasi tentang zakat. Bahkan kalau dirunut lebih jauh lagi ke belakang, sebenarnya regulasi tentang zakat sudah ada sejak sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Hanya saja tujuan adanya regulasi zakat pada masa pemerintahan kolonial berbeda dengan tujuan dibuatnya regulasi zakat oleh negara Republik Indonesia. Pengelolaan zakat oleh negara dimulai dengan institusionalisasi zakat oleh negara Republik Indonesia yang digagas oleh Presiden Soeharto dalam pidatonya pada peringatan isra' mi'raj 26 Oktober 1968. Pada kesempatan itu ia mengemukakan bahwa dirinya sebagai warga negara akan berpartisipasi dalam proses nasional pengumpulan zakat dan pendistribusiannya. Selanjutnya presiden menginstruksikan kepada tiga pejabat tinggi negara untuk menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengumpulkan zakat secara nasional.

Kabupaten Ponorogo sebagai bagian dari pemerintah pusat Negara Kesatuan Republik Indonesia tentunya menginduk dan mengikuti semua peraturan perundang-undangan, kebijakan dan semua regulasi yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Tidak terkecuali dalam hal pengelolaan zakat. Apabila pengelolaan zakat secara nasional melibatkan peran pemerintah dan ulama, maka di kabupaten Ponorogo pun pengelolaan zakat juga tidak terlepas dari peran dan kontribusi pemerintah dan ulama. Kerjasama antara pemerintah dengan ulama dalam kepengurusan organisasi atau lembaga diharapkan akan lebih menjamin integritas dan memperkuat kinerja pengelolaan zakat. Para ulama, kiyai, muballigh, da'i, dan apapun sebutannya, mereka sebagai penasihat atau

pembimbing umat diharapkan dapat memberikan pencerahan dan pemahaman serta membangkitkan motivasi dalam pelaksanaan zakat.

Penelusuran peneliti terhadap peranan pemerintah dan ulama dalam pengelolaan zakat di kabupaten Ponorogo dapat dijelaskan sebagai berikut. Pemerintah dalam bahasan ini ialah semua yang terlibat dalam penyelenggaraan negara, baik unsur eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Pemerintah dalam pengelolaan zakat, telah diatur berdasarkan undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 38 tahun 1999; dan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji nomor D/291 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat. Undang-undang mendorong pembentukan lembaga pengelola zakat.

Peran pemerintah secara politik nasional banyak bersifat legislatif, membuat regulasi dan undang-undang. Kemudian secara eksekutif melaksanakan undang-undang dengan membentuk Badan Amil Zakat dengan kelembagaannya sebagai pelaksanaan amanat undang-undang itu. Kelembagaan Badan Amil Zakat disusun dari tingkat nasional pusat di ibukota sampai ke tingkat kabupaten.

Di tingkat kabupaten Badan Amil Zakat Daerah dibentuk berdasarkan undang-undang zakat Republik Indonesia dan peraturan-peraturan yang berlaku. Para guru di sekolah, dosen di perguruan tinggi agama Islam khususnya mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam agar mereka memahami dan menguasai ilmu-ilmu agama, hukum Islam, termasuk di dalamnya ilmu Fiqh tentang zakat.

infaq 2,5 % kepada perserikatan. Dengan cara ini berarti, ulama dan perserikatan Muhammadiyah ikut serta mensosialisasikan zakat dan pengelolaannya. Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) didirikan sebagai lembaga mandiri yang mengelola dan menggalakkan pelaksanaan zakat infaq dan sedekah. Pengelolaan zakat infaq sedekah ini kemudian diwacanakan untuk diintegrasikan ke dalam organisasi, sebagai bagian dari perserikatan Muhammadiyah secara makro, dimana semua kebijaksanaan ditarik ke dalam perserikatan. Kemudian LAZISMU dijadikan Unit pengumpul zakat (UPZ) dan menjadi mesin penggerak. Prospek ke depannya lagi membangun LAZISMU menjadi pengelola zakat yang terpercaya dan menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan terkait seperti perbankan nasional, perpajakan dan BUMN.

Muhammadiyah mereaktualisasikan pemikiran zakat, dengan memandang zakat secara totalitas dalam kehidupan sosial ekonomi. Sebagai contoh, Muhammadiyah mereinterpretasikan makna fakir, miskin, dan sabilillah di antara *asnāf* delapan mustahik zakat dalam konteks Islam yang berkembang. LAZISMU yang dibentuk sementara ini fokusnya menangani zakat *māl* dan profesi. Sedangkan zakat fitrah tidak menjadi fokus.

Apa yang dipaparkan di atas merupakan peran pemerintah dan ulama dalam upaya mensosialisasikan pelaksanaan hukum zakat dan pengelolaannya di masyarakat. Peran pemerintah dan ulama tersebut relatif lemah dan kecil, masih sulit untuk dikatakan berhasil, karena memang belum signifikan, bila dilihat dari

